



Diaspora Bugis dan Ketegangan Maritim di Kutai-Pasir: Kajian Historis Konflik Laut di Kalimantan Timur abad ke-18-19

Thamara Nur Salsabila^{1*}, Agussalim Baharuddin²

¹⁻² Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: tamaranursalsabila001@email.com

Abstract. *This Study explore the study of The Bugis people's migration from south sulawesi to East Kalimantan on their settlement in Kutai dan Pasir from the 18th through 19th centuries. It looks at how the Buginese diaspora established independent groups, traded and developed political clouth through smart partnerships like marriages with local elites, all motivated by marine culture and economic aspirations. Internal disputes among Bugis factions, particularly over taxation and port countrol, and tentions with local authorities were frequently the results of these developments. In oder to increase their power in the area, the Dutch Colonial authorities kept an eye on these conflicts and accosianally got involved. This study emphasises how the Bugis significantly influenced power dynamics and coastal administration in East Kalimantan throughout both indigenous and colonial regimes, drawing on historical documents, open access academic sources and Buginese manuscripts.*

Keywords: Bugis Diaspora, Kutai Pasir, Maritime Conflict, Hystory of East Kalimantan

Abstrak. Penelitian ini mengkaji sejarah migrasi masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur, dengan fokus pada pemukiman mereka di Kutai dan Pasir pada abad ke-18 hingga ke-19. Ini mengeksplorasi bagaimana diaspora Bugis, didorong oleh budaya maritim dan ambisi ekonomi, membentuk komunitas otonom, terlibat dalam perdagangan, dan membangun pengaruh politik melalui aliansi strategis seperti perkawinan silang dengan elit lokal. Perkembangan ini sering menimbulkan ketegangan dengan penguasa lokal dan konflik internal di antara faksi-faksi Bugis, terutama mengenai penguasaan pelabuhan dan perpajakan. Pemerintah kolonial Belanda mengamati dan kadang-kadang campur tangan dalam perselisihan ini, menggunakannya untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Diambil dari sumber-sumber ilmiah akses terbuka, catatan sejarah, dan manuskrip Bugis, penelitian ini menyoroti bagaimana suku Bugis memainkan peran transformatif dalam membentuk hubungan kekuasaan dan tata kelola pesisir di Kalimantan Timur di bawah rezim pribumi dan kolonial.

Kata kunci: Disapora Bugis, Kutai Pasir, Konflik Maritim, Sejarah Kalimantan Timur

1. LATAR BELAKANG

Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara dengan garis pantai yang menempati hampir 70% dari seluruh luas daratannya. Alhasil, banyak potensi pariwisata yang harus digali dan dikembangkan. Manfaat industri maritim Indonesia telah lama dipergunakan oleh masyarakat Nusantara, khususnya di bidang migrasi dan perdagangan, yang sangat penting bagi perekonomian Kerajaan-kerajaan jauh sebelum para pelancong tiba di Nusantara. Laut telah lama menjadi elemen krusial dalam proses pembangunan peradaban, khususnya bagi masyarakat Bugis di pulau Sulawesi. Penduduk Bugis telah bermigrasi ke banyak wilayah Indonesia, yang dalam beberapa hal memiliki sejarah konflik di luar Sulawesi, seperti konflik Jawa pada tahun 17 dan 18, serta sengketa

politik di provinsi Riau-Lingga. Suku bugis merupakan salah satu suku bangsa yang diasosiasikan dengan tradisi kelautan yang kuat dan ulung. Sejak abad ke-17, suku bugis tidak hanya melakukan perjalanan ke wilayah lain di tanah air, tetapi juga menjalin jejaring sosial-politik baru di banyak wilayah di Indonesia. (Alamsyah, 2022)

Tradisi merantau masyarakat bugis telah membawa mereka ke berbagai daerah di sekitar Sulawesi, salah satunya Kalimantan. Migrasi yang mereka lakukan yaitu ke wilayah Kalimantan salah satunya didasarkan pada budaya "Massompe" mereka, yaitu kegiatan yang melibatkan perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lain. Selain itu, diaspora yang tercipta didasari oleh adanya rasa ketidaksetujuan masyarakat Bugis terhadap jatuhnya Makassar ke tangan VOC yang terjadi pada masa lalu, tahun 1667. Alhasil, untuk terhindari dari konflik yang terjadi di daerah asal mereka dan menyelamatkan keturunan keluarga, mereka memutuskan untuk bermigrasi. Karena ciri geografisnya yang hanya dapat ditempu dengan perjalanan laut selama dua hari dari pesisir Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, khususnya wilayah Kutai dan Samarinda, menjadi salah satu tujuan wisata paling populer. Masyarakat Bugis yang tidak hanya ditemukan di wilayah Kalimantan Timur, tetapi juga di belahan dunia lain, telah membentuk komunitasnya sejak abad ke-18 hingga abad ke-19. (Mansyur, 2020)

Nantinya, Masyarakat Bugis yang telah berdiaspora ini tidak hanya terlibat dalam sektor usaha tetapi juga terhadap peristiwa sosial dan politik yang berlangsung di Timur. Suku bugis yang datang membentuk komunitas pemilikannya sendiri, setelah itu mereka melanjutkan studi dan mengembangkan ilmu ekonomi dan berhasil mengatur perdagangan seperti beras, garam, rempah-rempah, kopi, tembakau, dan kebutuhan lainnya. (Sjaf, 2009) Selain di bidang perdagangan, masyarakat Bugis juga ikut serta dalam ranah politik dan pemerintahan serta ikut mengambil peran dalam konflik-konflik yang terjadi di wilayah perantauan mereka khususnya di Kutai-Pasir. Salah satu catatan sejarah yang menunjukkan adanya keterlibatan suku Bugis pada konflik internal adalah sejarah Muara Badak pada tahun 1806 dimana wilayah selat Makassar termasuk Kutai Kertanegara menjadi sasaran perompak karena lemahnya control pelayaran VOC, karenanya Sultan Ahmad Saleh dari Bone mengirim putranya, Muhammad Ismail ke kutai untuk menawarkan kerja sama perlindungan. (Bpcbkalim, 2020) Serangan koalisi Bugis-Sulu juga pernah terjadi pada awal abad ke-18 yang menyebabkan Kesultanan Kutai harus memindahkan ibu kotanya ke Pamarangan pada tahun 1832 yang menunjukkan keberadaan Masyarakat Bugis memiliki dampak yang signifikan dan

memunculkan adanya dinamika dalam hubungan antar komunitas khususnya masyarakat Bugis dan Masyarakat lokal di Kalimantan Timur. (Kaltimkece, 2020)

Sejumlah penelitian telah mengkaji bagaimana peristiwa diaspora Bugis terjadi di Kalimantan, namun masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus menyorot bagaimana dinamika konflik maritim yang melibatkan komunitas Bugis di wilayah Kutai-Pasir, Kalimantan Timur.. Banyak karya sastra yang lebih menitikberatkan pada isu identitas keagamaan, jejaring dagang, dan integrasi sosial yang terjadi, namun tidak merinci bagaimana konflik dan keterkaitan interaksi di wilayah pesisir Kalimantan Timur terjadi dalam konteks sejarah sepanjang tahun. 18-19. Kajian ini sangat penting agar dapat menganalisis kekosongan tersebut dan memberikan wawasan baru tentang konflik maritim lokal yang ada di Indonesia. Dengan mengkaji ketegangan yang terjadi antara suku Bugis yang mendiami Kutai-Pasir dan masyarakat setempat itu sendiri. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang lingkungan maritim, keterkaitan pesisir, dan dinamika etnisitas dalam konteks perbatasan laut.

2. KAJIAN TEORITIS

Untuk lebih memahami bagaimana masyarakat Bugis di Kutai-Pasir, Kalimantan Timur, telah beradaptasi dengan lingkungan baru, penelitian ini menggunakan teori diaspora dan identitas diaspora yang berfokus pada konsep yang dikenal sebagai "in-between identity", di mana identitas masyarakat Bugis dikembangkan melalui pertukaran lintas batas sesuai dengan identitas kolektif mereka dan adaptasi yang mereka buat di lingkungan baru mereka. Konsep ini relevan dengan analisis kedudukan sosial masyarakat Bugis yang tinggal di Kalimantan Timur. Mereka mampu mempertahankan identitas budayanya. Namun, mereka juga harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal di daerah tempat mereka tinggal. Identitas-identitas ini kemudian digunakan sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial, ikatan politik, dan bahkan jaringan antarpribadi di dalam komunitas mereka sendiri. (Bhattarai, 2025)

Kemudian, dalam melihat bagaimana kemudian dominasi dan kekuatan masyarakat Bugis menimbulkan konflik dengan penduduk lokal di Kutai-Pasir, teori konflik digunakan sebagai lensa analisis. Menurut Galindo-Silva (2020), jika dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar atau bahkan lebih kecil, etniks yang memiliki tingkat kedudukan menengah sebagai penduduk lokal di tatanan cenderung berpeluang lebih besar untuk terlibat dalam mengakses kekuasaan lokal. Namun, situasi ini pun cenderung menimbulkan konflik dengan penduduk lokal yang lebih dominan.

Analisis ini akan membantu dalam mengamati apa yang dapat terjadi di Kalimantan Timur, di mana dominasi masyarakat Bugis di sektor perdagangan dan kemampuannya menciptakan andil dalam struktur kekuasaan dapat menimbulkan perlawanan dari kekuasaan setempat. Posisi kekuatan Bugis yang kuat dalam struktur ekonomi dapat jadi pemicu terbentuknya ketegangan etnik. (Galinda-Silva, 2020)

Selain aspek identitas dan konflik etnik, melihat bahwa pada abad ke-18-19 nusantara masih dalam pengaruh kekuasaan kolonial, intervensi yang dilakukan oleh elemen tersebut pun menjadi hal yang penting dalam melihat posisi strategis diaspora Bugis. Penelitian yang dilakukan oleh Gasparyan (2023) menunjukkan bahwa model *indirect rule* merupakan strategi yang digunakan pemerintah kolonial untuk memanfaatkan elit lokal dalam menguasai suatu penduduk tanpa harus turun tangan secara langsung sama sekali. Model ini sejalan dalam pendekatan yang dilakukan oleh kolonial Belanda yang seringkali memanfaatkan konflik lokal sebagai media dalam melakukan intervensinya Strategi ini tercatat telah diterapkan oleh Belanda yang dulu menjajah Indonesia yang dalam konteks ini di Kutai-Pasir dilakukan melalui pengangkatan tokoh-tokoh etnis untuk memimpin dan mengarahkan kelompok etnisnya sendiri guna mempertahankan stabilitas dan kontrol mereka terhadap wilayah-wilayah kekuasaan dengan potensi konflik tanpa harus turun dan menimbulkan perlawanan langsung. (Gasparyan, 2024)

Ketiga teori ini kemudian akan membantu dalam menyusun kerangka analisis terhadap dinamika sosial dan politik yang dapat terjadi antara komunitas Bugis dengan kekuasaan lokal di Kutai-Pasir serta mengkaji bagaimana kemudian migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis bersama identitas diasporik yang mereka bawa berinteraksi dengan kekuasaan lokal dan kolonial

3. METODE PENELITIAN

Penulis dalam menjelaskan mengenai topik yang akan diteliti menggunakan teknik deskriptif dengan memanfaatkan metode studi literatur. Penulis memanfaatkan beberapa sumber literatur untuk mendapatkan data yang bermakna dan relevan untuk membantu saya dalam menjelaskan fenomena yang ingin saya bahas. Buku-buku, makalah, catatan, dan hasil penelitian yang telah melalui prosedur tinjauan jurnal merupakan data yang di kumpulkan dari pendekatan penelitian studi jurnal ini.

Metodologi penelitian jurnal ini menggunakan studi literatur karna dirasa merupakan metode yang tepat dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan topik yang akan diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Migrasi Bugis ke Wilayah Kutai dan Pasir

Masyarakat Bugis, migrasi bukan hanya untuk mencari kekayaan tetapi juga kesempatan untuk mencari ilmu yang dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup. Semangat mereka merupakan wujud keberanian dalam menghadapi tantangan baru dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, dalam menjalani kehidupan yang lebih baik membuat mereka memiliki kegigihan dalam menghadapi berbagai tantangan. Suku Bugis memiliki keterampilan dalam bertahan hidup di daerah pesisir karena sistem sosial budaya yang mereka miliki secara turun temurun. Diaspora yang mereka dirikan merupakan solusi terbaik untuk permasalahan sosial yang tidak berdampak pada negara asalnya, yaitu Sulawesi Selatan. Perantauan yang mereka lakukan tersebar di berbagai daerah di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Masyarakat Bugis dapat ditemukan di banyak tempat, seperti Sumbawa, Flores, Batavia, Pasir, Kutai, dan Pesisir Barat Johor, dan mereka selalu memiliki apa pun yang mereka butuhkan untuk memastikan kehidupan mereka berjalan lancar di tempat mana pun yang mereka kunjungi. Mereka tidak hanya berhasil dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka juga memiliki dominasi di berbagai bidang dan berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Adaptasi ini dilakukan tidak hanya untuk dapat bertahan taapi juga berkembang di daerah perantauan. (Alamsyah, 2022)

Masyarakat Bugis juga dikenal dengan budaya "passompe", yang merupakan cara hidup mereka saat melakukan penjelajahan dan berdagang. Budaya ini yang menjadi salah satu faktor yang kemudian membentuk diaspora yang mereka lakukan. Hubungan erat yang mereka bangun dengan laut, yang mereka percayai sebagai sebuah sumber kehidupan dan bagian dari identitas budaya mereka. (Lineton, 2018) Tradisi ini mengharuskan mereka membentuk komunitas yang erat di mana mereka akan menukar hasil laut, rempah dan kerajinan tangan ke pasar yang lebih luas di luar daerah hingga ke luar Nusantara seperti Malaysia, Singapura dan Thailand lalu kembali membawa barang atau alat yang tidak tersedia di Sulawesi Selatan. Massompe ' tidak hanya dilihat sebagai praktik kebudayaan tetapi juga mencerminkan keberanian yang besar meninggalkan kampung halaman untuk menghadapi tantangan di tempat yang sama sekali baru.

Tindakan yang mereka lakukan juga dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka ke jenjang yang lebih tinggi. (Attila Fath Haeril Putra, 2024)

Selain fakta bahwa *massompe'* adalah identitas yang dimiliki oleh Masyarakat Bugis, diaspora yang mereka lakukan juga dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan VOC di Makassar. Pada abad ke-17 saat VOC menguasai Makassar mereka melakukan monopoli dalam perdagangan. Saat itu Makassar merupakan pusat produksi dan perdagangan rempah-rempah, kayu, dan kapas yang sangat menguntungkan. VOC berusaha untuk menyingkirkan kompetitor lokal maupun dari negara lain seperti pedagang Asia dan Eropa, demi dapat memiliki kekuasaan penuh atas perdagangan yang ada di sana. Konflik pun terjadi antar Kerajaan Sulawesi Selatan dan VOC berusaha untuk campur tangan dalam kejadian tersebut. Konflik yang muncul di Sulawesi Selatan membuat banyak Warga Desa ingin mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik. Para raja dari Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan memutuskan untuk mengutus anak-anak mereka ke berbagai daerah untuk menjauhkan mereka dari bahaya peperangan.

Pada abad yang sama, penduduk Bugis yang pindah ke Kalimantan membentuk desa-desa independen di Kutai. Perantauan ini dimulai dengan tujuan perdagangan, dengan beberapa kapal berlayar dari Sulawesi Selatan ke Kutai. Namun, banyak pelayar memutuskan untuk menetap karena komoditas perdagangan yang ada di sana mulai berkembang. Setelah itu, suku Bugis yang tinggal dan tinggal di wilayah Kutai semakin terlibat dalam perdagangan. Setelah menyadari dinamika yang mulai muncul antara pedagang lokal dan pedagang Bugis yang menetap, Kesultanan Kutai meminta seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka. Ketua keluarga bangsawan dipilih, dan warga Bugis desa menyetujuinya. Pemimpin yang dipilih kemudian dikenal sebagai "Pua Adu". Keberadaan suku Bugis yang ada di Kutai sendiri menimbulkan sebuah masalah sosial dimana mereka tidak disukai oleh rakyat lokal dan Sultan Kutai yang mengakibatkan seringnya terjadi penyerangan terhadap Masyarakat Bugis yang ada di sana oleh warga lokal beretnis Dayak, dan kesultanan Kutai juga sering menyerang desa-desa Bugis, tetapi mereka akhirnya terusir dari tahtanya sendiri. (Parani, 2015)

Salah satu tokoh yang dianggap sebagai pendiri dari diaspora yang dilakukan oleh suku Bugis dikenal sebagai La Maddukelleng. Menurut Lontara Sukkuna Wajo, sebuah naskah Lontar suku Wajo, La Maddukelleng adalah bangsawa Wajo yang meninggalkan Sulawesi Selatan pada tahun 1714. Pada tahun 1726, La Maddukelleng menjadi bajak laut di daerah Johor dan Selat Malaka. Kemudian, melalui Selat Makassar, dia pergi ke daerah Pasir di Kalimantan Timur. Selama perjalanannya, delapan bangsawan menengah lainnya

bergabung dengannya sebagai komandan dan pemimpin. Anak dari Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana Sultan Aji Muhammad Alamsyah, raja kesultanan Pasir saat itu, La Maddukelleng kemudian menikahi Andin Anjang. Saat Sultan meninggal, Andi Anjang diangkat sebagai ratu, tetapi masyarakat menolaknya dan malah memberontak. Untuk memperbaiki keadaan, La Maddukelleng dan pasukannya pun menyerang Pasir dan menaklukkannya. Pada tahun 1726–1736, ia menjabat sebagai Raja Pasir. Banyak masyarakat Wajo kemudian mengikuti jejak La Maddukelleng ke daerah ini. Terlebih saat sekitar tahun 1726-an, tanah Wajo disusuki oleh Kerajaan Wajo Bone, sehingga banyak yang meninggalkan kampung halaman mereka dan berlayar ke Pasir dan menetap di Sungai Muara Kendilo yang bermuara di daerah Pasir. Pemukiman baru kemudian secara bertahap berkembang menjadi lebih padat karena terus meningkatnya migrasi dari Wajo, Sulawesi Selatan. (Budhi, 2015)

Peran Sosial-Ekonomi Diaspora Bugis dan Ketegangan dengan Kekuasaan Lokal

Berdasarkan Penjelasan historis yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa diaspora masyarakat Bugis di wilayah Kutai dan Pasir mengembangkan peran yang lebih kompleks selain perdagangan. Sebagai etnis yang memiliki budaya yang merantau untuk memperbaiki nasib hidup mereka sering menunjukkan bagaimana niat yang mereka miliki menunjukkan hasil yang memuaskan. Sistem sosial, identitas etnis, dan integrasi yang dibawa oleh masyarakat Bugis ketika mereka berdiaspora dan menetap di Kutai dan Pasir. Budaya ini didasarkan pada kepemimpinan informal, kekerabatan, dan nilai yang mereka bawa dari kampung halaman mereka. (Ismail Suwardi Wekke, 2019) Masyarakat Bugis telah terbiasa dalam melakukan jaringan perdagangan antar wilayah seperti antar Sulawesi Selatan dengan Kalimantan, Malaysia, bahkan terdapat catatan yang menunjukkan bahwa Masyarakat Bugis sejak abad ke-18 telah memasuki Pelabuhan Singapura yang membuat mereka dapat berkembang dengan pesat dalam aktivitas perdagangan. Hal ini menunjukkan bagaimana pasar dapat menjadi ruang dalam melakukan sosial-politik untuk menjalin jaringan yang lebih luas tidak hanya sebagai tempat pertukaran barang saja. Masyarakat Bugis juga tidak hanya mengandalkan sektor laut sebagai tempat mata pencaharian tetapi juga dalam bidang pertanian, dan Perkebunan. (Suryanti, 2020)

Mereka mungkin mengalami ketegangan dengan masyarakat dan pemerintahan lokal Kutai karena dominasi mereka. Otoritas lokal khawatir posisi mereka akan terancam oleh kekuatan dari pihak pendatang karena keberhasilan perdagangan mereka. Oleh

karena itu, konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perselisihan ekonomi tetapi juga melibatkan serangan fisik terhadap desa dan komunitas Bugis yang sudah mapan. Namun, dalam kasus Kutai, penyerangan justru berbalik arah ketika masyarakat Bugis berhasil bertahan dan memecat Sultan Kutai. Masyarakat Bugis yang datang ke Pasir sendiri melakukan transaksi ekonomi dan sosial. Pernikahan La Maddukelleng dengan Andin Anjeng adalah simbol perpaduan dua kelompok budaya dan keinginan kuat untuk menetap di daerah tersebut. Selain itu, itu juga bertujuan untuk memperkuat posisinya di struktur politik untuk memperoleh lebih banyak kuasa dan pengaruh. Ini menunjukkan bahwa suku Bugis tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi juga mampu membangun kekuasaan dan mengintervensi sistem kekuasaan lokal yang ada. Ini dapat dikaitkan dengan identitas etnis Bugis sebagai perantau yang berani dan tangguh yang didukung oleh tradisi *massompe*, yang mendukung pandangan mereka bahwa merantau bukan hanya sebagai cara untuk mencari nafkah tetapi juga untuk meningkatkan status sosial.

Peran Sosial-Ekonomi Diaspora Bugis dan Ketegangan dengan Kekuasaan Lokal

Dinamika yang terjadi antara komunitas bugis dengan kekuatan lokal di wilayah Kutai dan Pasir tentunya dapat berujung pada sebuah konflik mengingat adanya ambisi politik-ekonomi Masyarakat Bugis di wilayah perairan Kalimantan Timur. Naskah penelitian Tromp pada tahun 1887 berjudul *Eenige Mededeelingen Omtrent de Boeginezen van Koetai*, mencatat bahwa hubungan yang terjadi anatar komunitas Masyarakat Bugis dengan Kutai tidak selamanya berjalan baik. Perselisihan pertama terjadi saat ibu kota Kerajaan Kutai Kertanegara masih berada di Kutai Lama di mana kala itu, Masyarakat Bugis melakukan Persekutuan dengan armada Kerajaan Sulu yang menguasai bagian Filipina Selatan dan Sebagian utara Kalimantan dan melakukan penyerangan ke Kutai Lama yang di pimpin oleh kelompok *Pua adu* yang pertama. Konflik ini dilatar belakangi karena ketidaksenangan mereka dengan pelaksanaan sebuah upacara adat Bernama Erau yang mewajibkan istri *pua adu* untuk menjadi seorang relawan.

Situasi Samarinda di bawah kepemimpinan *pua adu* kala itu memang dilihat tidaklah kondusif karena merajalelanya kriminalitas dan seringnya terdapat keterlibatan *pua adu* dan jajarannya dalam konflik internal. Keadaan ini kemudian membuat kelembagaan *pua adu* mulai kehilangan legitimasinya karena dianggap lalai dalam menegakkan hukum. Masalah perpajakan impor dan ekspor komoditi juga menjadi

masalah tambahan bagi hubungan antara orang Bugis dan Kesultanan Kutai. Lalu pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Aji Muhammad Sulaiman kemudian mengangkat kepala polisi Ince Miril yang kemudian menambah ketegangan antara dua komunitas. Ince Miril yang secara konsisten berusaha masuk dalam urusan internal komunitas Bugis mulai mengusulkan peraturan-peraturan yang memangkas kewenangan *pua adu* atas persetujuan Kesultanan. Namun konflik tidak juga kunjung mereda bahkan setelah kesultanan memberikan jabatan pengganti untuk kepemimpinan masyarakat Bugis dengan julukan penggawa, hingga pada akhirnya Sultan menghapuskan segala bentuk dan nama bagi kepala suku Bugis di Samarinda. Sejak Sultan kemudian menetapkan Ince Meril yang bergelar Pangeran Bendahara sebagai pemimpin tetap komunitas Bugis di Samarinda, Masyarakat Bugis tidak lagi memiliki pemimpinnya sendiri dan keadaan ini berhasil menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban pada masa itu. (Kaltimkece, 2020)

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 75 yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum A.D.H. Heringa pada tanggal 16 Agustus 1896, Samarinda ditetapkan sebagai wilayah *Rechtstreeks Gouvernemen Bestuur Gebied*, yang merupakan wilayah di bawah pemerintahan Belanda. *VierkantePaal*, pinjaman dari Kesultanan Kutai, juga diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Belanda juga telah berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Kutai maupun Kerajaan Pasir untuk waktu yang lama. Inisiasi pertama yang coba dilakukan adalah pada tahun 1634 dimana kompeni VOC mencoba untuk mengajak Kutai dan Pasir untuk menguasai dan memonopoli perdagangan dari pulau Sulawesi Selatan dan Jawa namun sayangnya Kerajaan Gowa telah memiliki hubungan yang baik dengan raja-raja Kutai sejak 1620. Lalu pada tahun 1635 usaha monopoli kembali coba dilakukan yang dipimpin oleh G. Thomassen Pool dengan cara mengadu domba raja-raja di Kalimantan Timur dan Banjarmasin namun juga gagal untuk dilakukan. Pada tahun 1635, G. Thomassen Pool memimpin upaya monopoli lagi dengan mengadu domba raja-raja di Kalimantan Timur dan Banjarmasin, tetapi tetap tidak membuahkan hasil.

Setelah empat tahun setelah perjanjian Bongaya ditandatangani pada tahun 1671, Kompeni kembali mengirim misi perdagangan di bawah pimpinan Paulus de Beck. Mereka tidak hanya berusaha untuk menjalin hubungan langsung dengan Kutai dan Pasir, tetapi juga berusaha untuk melemahkan kerja sama perdagangan antara Kutai, Pasir, Gowa, dan Jawa di selat Makassar. Meskipun beberapa upaya tidak berhasil, surat-surat terus dikirimkan kepada raja-raja Kutai dan Pasir. Ini tampaknya menunjukkan bahwa

ada kesempatan untuk mengirimkan barang dari daerah Kutai dan Pasir ke Makassar. Namun sejak kelompok diaspora Bugis Wajo mulai bermukim di Kutai dan Pasir terutama di Samarinda, perdagangan Kutai dengan Belanda perlahan mulai terputus dan karena tidak adanya jaminan keamanan orang Eropa untuk bermukim di daerah tersebut, hubungan dagang antara keduanya pun gagal terlaksana. (BPCBKaltim, 2022)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Interaksi kompleks antara diaspora Bugis, kekuatan lokal di Kutai dan Pasir, dan kepentingan kolonial Belanda mencerminkan lanskap politik maritim Kalimantan Timur yang rumit pada abad ke-18 dan ke-19. Suku Bugis, yang terkenal dengan kegiatan pelayaran dan komersialnya, tidak hanya menetap tetapi secara aktif terlibat dalam dinamika kekuasaan daerah-seringkali bentrok dengan penguasa adat seperti Kesultanan Kutai. Pada saat yang sama, penguasa kolonial Belanda berusaha memanfaatkan ketegangan ini sebagai sarana untuk menegaskan pengaruh dan mengamankan jalur perdagangan, meskipun upaya mereka tidak selalu berhasil, terutama ketika penguasa lokal mempertahankan aliansi strategis dengan suku Bugis. Namun, seiring berjalannya waktu, melalui kebijakan administratif seperti pengangkatan pemimpin adat yang berpihak pada Belanda dan pembongkaran otonomi internal masyarakat Bugis, pemerintah kolonial secara bertahap memperkuat kontrolnya atas wilayah-wilayah utama seperti Samarinda. Perkembangan ini menyoroti bagaimana konflik maritim di Kalimantan Timur bukan semata-mata sengketa ekonomi lokal tetapi merupakan bagian dari perebutan kekuasaan dan pengaruh yang lebih luas yang membentuk kontur tata kelola maritim kolonial di kepulauan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah. (2022). The political dominance of the Bugis in the coastal region of Indonesia from the 17th century to the 19th century. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 6, 30–31.
- Bhattarai, P. P. (2025). Diasporic identity: A transnational consciousness – in Rai's *There is a Carnival Today*. *Adhyayan Journal*, 32–38.
- BPCBKaltim. (2020). *Kehadiran Suku Bugis dan statusnya di Muara Badak, Kalimantan Timur*. Direktorat Jendral Kebudayaan. Diakses 17 Mei 2025, dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkalit/kehadiran-suku-bugis-dan-statusnya-di-muara-badak-kalimantan-timur>

- BPCBKaltim. (2022, Maret 23). *Samarinda dari masa kerajaan hingga VOC*. Kebudayaan Kemendikbud. Diakses 17 Mei 2025, dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkalim/samarinda-dari-masa-kerajaan-hingga-voc/>
- Budhi, S. (2015). Bugis Pagatan: Migration, adaptation and identity. *International Journal of Humanities and Social Science*, 73.
- Galinda-Silva, H. (2020). Ethnic groups' access to state power and group size. *Cornell University*, 2–7.
- Gasparyan, O. (2024). Indirect rule and public goods provision: Evidence from colonial India. *Political Science Research and Methods*, 445.
- Haeril Putra, A. F., & D. I. (2024). Menggali makna tradisi passompe' dalam warisan budaya maritim Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4–5.
- Kaltimkece. (2020). *Riwayat muram Republik Bugis di Samarinda: Berdiri atas izin sultan, dihapus karena kesalahan berulang*. Diakses 17 Mei 2025, dari <https://kaltimkece.id/historia/peristiwa/riwayat-muram-republik-bugis-di-samarinda-berdiri-atas-izin-sultan-dihapus-karena-kesalahan-berulang>
- Mansyur. (2020). Dinamika Kerajaan Bugis Pagatan di landschap Tanah Bumbu tahun 1842–1900. Dalam H. A. Hairiyadi (Penyunt.), *Lintas sejarah maritim Kalimantan Selatan* (hlm. 210–211). Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.
- Parani, J. L. (2015). *Perantauan orang Bugis abad ke-18*. Jakarta: Naskah Sumber Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Sjaf, M. Z. (2009). Sejarah perkembangan desa Bugis–Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(2), 49.
- Suryanti, I. M. (2020). Sejarah diaspora Suku Bugis–Makassar di Kalimantan Tengah. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 105–108.